

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang sangat baik, tercatat pertumbuhan Indonesia pada tahun 2016 naik menjadi 5.0% dibandingkan pada tahun 2015 hanya sebesar 4.9%. Pertumbuhan perekonomian Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor dan sektor-sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM tidak bisa dianggap remeh karena ketika terjadi krisis ekonomi sektor UMKM lah yang dapat bertahan. Presiden Republik Indonesia, Jokowi menyatakan bahwa UMKM dapat menjadi pilar pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena dengan adanya UMKM dapat mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan peningkatan daya beli masyarakatnya. Menyadari adanya peranan penting sektor UMKM, pemerintah memberikan perhatian yang besar dan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha yang mereka tekuni.

Pemerintah menyadari bahwa untuk perkembangan UMKM, para pelaku UMKM membutuhkan modal yang dapat digunakan untuk menyokong pengembangan usaha mereka, oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan lembaga perbankan membantu para pelaku UMKM dalam segi permodalan. Salah satu lembaga perbankan yang erat kaitannya dengan UMKM adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. BPR menjadi salah satu lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM karena lokasi BPR yang strategis dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada masyarakat yang lebih sederhana, lebih mengutamakan pendekatan personal dengan *customer*. Dengan kata lain BPR memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum. Adanya karakteristik tersebut, BPR dapat mendorong meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia.

BPR sebagai salah satu pelaku ekonomi tentu sangat diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan (Rudianto, 2013). Banyak kondisi dimana perusahaan sebenarnya dengan maksud baik dalam melakukan kebijakan keuangannya, namun terkadang karena kurangnya pengendalian dalam kebijakan perusahaan dapat mengakibatkan salah dalam pengambilan keputusan keuangan dan berdampak pada kinerja keuangan (Marbun and Situmeang, 2012). Salah satu topik pengukuran kinerja yang sering diperbincangkan di era globalisasi saat ini adalah pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan efisiensi. Efisien menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan BPR, hal ini dikarenakan semakin ketatnya persaingan dan BPR dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Ali (2016) menyatakan bahwa “Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi”. Pengukuran kinerja dengan pendekatan efisiensi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola

dan menggunakan semua faktor produksinya dengan maksimal. Pada umumnya, pengukuran kinerja perbankan yang sering digunakan menggunakan analisis rasio CAR, LDR, BOPO, ROA, ROE dan NPL; dari 5 jenis analisis rasio tersebut, rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan (BOPO) digunakan untuk pengukuran efisiensi perbankan.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang menggunakan rasio keuangan.

**Tabel 1.1 Rasio Kinerja BPR tahun 2016**

Rasio	Sumatera Utara	Nasional
CAR	21,01%	29,38%
LDR	71,40%	76,99%
<b>BOPO</b>	<b>86,37%</b>	<b>81,13%</b>
ROA	2,61%	2,69%
ROE	21,45%	24,25%
NPL	9,32%	6,54%

Sumber: data diolah penulis

Bank Indonesia menetapkan batas maksimal rasio BOPO yang harus dicapai BPR sebesar 85%, dimana semakin kecil rasio maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan dan sebaliknya semakin tinggi rasio yang dihasilkan semakin tidak efisien bank tersebut dalam mengelola biaya operasionalnya. Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi BPR secara nasional telah efisien karena tidak melewati batas rasio BOPO yang telah ditetapkan, namun rata-rata efisiensi BPR di Sumatera Utara belum efisien karena melewati batas maksimum yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi menggunakan rasio keuangan saja tidaklah cukup karena hanya menghasilkan posisi keuangan saja, tidak mampu menunjukkan besarnya sumber daya bank yang digunakan dalam mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, pengukuran efisiensi menggunakan rasio ini bersifat *Partial*

*Efficiency*, maksudnya adalah tidak dapat mengukur variabel-variabel lainnya yang mungkin dapat memengaruhi tingkat efisiensi.

Efisiensi di dunia perbankan menjadi hal yang penting, ini dikarenakan 3 hal yaitu: (1). Kompetisi yang bertambah berat (2). Permasalahan yang timbul sebagai akibat kurangnya sumberdaya (3). Meningkatnya standar kepuasan konsumen. Penekanan pada perlunya perhatian terhadap efisiensi lembaga perbankan didalam menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi, diharapkan lembaga perbankan dapat berkompetisi secara sehat serta menguntungkan bank, sehingga dapat menjamin sustainability lembaga perbankan dari kompetisi antar bank yang semakin ketat setiap tahunnya. Selain itu, pengukuran tingkat efisiensi pada sektor perbankan sangat penting karena informasi yang didapatkan dari pengukuran efisiensi tersebut dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan deregulasi pemerintah seperti identifikasi struktur pasar sampai berguna dalam meningkatkan kinerja manajerial berdasarkan pengalaman keberhasilan maupun pengalaman kegagalan suatu bank.

Akun aktiva (dalam hal ini aktiva produktif) dan akun biaya menjadi akun yang memiliki perhatian khusus dari pihak perbankan. Pengelolaan dan penyaluran aktiva produktif harus menjadi perhatian khusus oleh pihak BPR karena hal tersebut digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional BPR. Pengelolaan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan juga harus diperhatikan sehingga dapat mendapatkan profit yang maksimal.

Pengukuran efisiensi pada organisasi memang bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan, begitu pula pengukuran tingkat efisiensi pada

BPR. Hal ini dikarenakan:

1. BPR merupakan kumpulan dari berbagai macam perilaku maupun sumber daya yang kompleks sehingga sulit untuk memperoleh ukuran efisiensi organisasi yang absolut. Kondisi ini menyebabkan untuk lebih mengarahkan penggunaan nilai efisiensi relatif, dimana melakukan perbandingan dari BPR satu dengan BPR lainnya.
2. BPR tersusun dari proses transformasi multi dimensional, dimana banyak input yang dimanfaatkan untuk menghasilkan banyak output. Perolehan suatu bobot yang tepat untuk input dan output sehingga dihasilkan suatu nilai efisiensi yang dapat menunjukkan efisiensi suatu BPR secara menyeluruh.

Kesulitan-kesulitan tersebutlah yang kemudian memunculkan suatu metode baru yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa objek berdasarkan rasio output terhadap inputnya. Metode tersebut juga telah sering dipakai untuk mengukur efisiensi. Metode ini dikenal dengan nama metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode DEA dapat menunjukkan gambaran yang menyebabkan suatu BPR tidak efisien. Tentunya, sumberdaya (faktor-faktor) yang memengaruhi efisiensi BPR penting diketahui untuk menetapkan kebijakan ataupun strategi yang akan dilakukan sehingga dapat memengaruhi kinerja BPR tersebut.

DEA memiliki beberapa keunggulan seperti dapat digunakan untuk menganalisis kasus yang memiliki hubungan kompleks diantara berbagai input dan output dalam satu lembaga atau aktivitas yang tidak mampu dipecahkan dengan menggunakan alat analisis lain, serta dapat mengidentifikasi sejumlah variabel

disertai hubungan yang banyak seperti halnya program matematik. DEA sangat dibutuhkan terutama dalam keadaan yang kompleks dimana terdapat banyak *output* dan *input*, yang tidak dapat dengan mudah dianalisis dengan teknik lainnya seperti analisis rasio dan juga jumlah unit layanan yang dievaluasi sangat banyak sehingga manajemen tidak dapat mengevaluasi setiap unit secara mendalam jika menggunakan analisis rasio. Jati (2014) menambahkan bahwa rasio keuangan hanya menghasilkan prediksi pada arah kebangkrutan atau keberhasilan, tanpa diketahui secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan menggunakan DEA maka dapat diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu bank tidak efisien yang dapat menyebabkan bank tersebut bangkrut. Selain itu, Metode DEA dapat mengidentifikasi bank mana yang telah mencapai tingkat efisiensi paling tinggi sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi bank yang kurang efisien dan dapat memberikan potensi peningkatan penggunaan sumberdaya yang dimiliki bank yang kurang efisien (Gunawan, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud meneliti dengan judul :  
“Pengkukuran Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara Berdasarkan Pendekatan Efisiensi Dengan Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)”

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2016 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
2. Apakah dapat dirumuskan tingkat efisiensi pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2016 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deli Serdang dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
2. Untuk membuat rumusan tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deli Serdang dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

### **1.4. Manfaat Pelaksanaan Penelitian**

- a. Bagi Penulis, dapat menggunakan teori-teori yang dimiliki untuk menganalisis masalah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Bagi Perusahaan, dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengukur kinerja perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang

ada di Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, berdasarkan pendekatan efisiensi dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

- c. Bagi Pemerintah, dapat sebagai sumber informasi untuk membuat suatu kebijakan pemerintah khususnya dalam meningkatkan efisiensi Bank Perkreditan Rakyat sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

### **1.5. Batasan Dan Ruang Lingkup Masalah**

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah penulisan skripsi ini, ada baiknya untuk membuat batasan masalah agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti hanya akan membahas tentang pengukuran kinerja Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan pendekatan efisiensi.
2. Pengukuran kinerja tersebut menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.
3. Pengindentifikasian faktor penyebab ketidakefisien kinerja pada BPR yang diteliti.